

ABSTRAK

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)

Jimmi Dohar Pandapotan (2310622058), Handyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Tindak pidana Administrasi Pertambangan sekarang ini sudah banyak terjadi sehingga menjadi perhatian serius khususnya banyaknya perusahaan – perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Berjalan terkena proses penyidikan di Kepolisian RI. Proses pro yustisia tersebut sejatinya tidak bisa diterapkan kepada korporasi yang mempunyai izin usaha pertambangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Berjalan karena pastinya ada tindakan hukum terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Cq. Direktorat Jenderal yaitu upaya administrasi dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan sehingga dalam hal ini terdapat tumpang tindih kewenangan dan aturan yang mengakibatkan adanya ketidak pastian dan kemanfaatan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui penelitian putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai putusan akhir dan dari kepustakaan. Hasil dari pendekatan penelitian ini, diperlukan adanya ketentuan yang jelas untuk mengakomodir pidana administrasi pertambangan khusus kepada perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kepentingan hukum, dan kepentingan negara. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam perkara-perkara pidana pertambangan baik dalam perkara pada penelitian maupun perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: pertambangan; pidana; IUP; RKAB; kewenangan; asas manfaat.

ABSTRACT

REFORMULATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATIONS HOLDING UNDERGROUND MINING BUSINESS PERMITS (VERDICT NUMBER 5499 K/PID.SUS/2024 Jo.329/PID.SUS/2023/PN.KTP)

Jimmi Dohar Pandapotan (2310622058), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Administrative Mining crimes have now occurred so frequently that they have become a serious concern, especially since many companies that have mining business permits and Current Budget Activity Plans are being investigated by the Indonesian Police. The pro yustisia process cannot actually be applied to corporations that have mining business permits and Current Budget Activity Plans because there must be legal action first taken by the Ministry of Energy and Natural Resources Cq. Directorate General, namely administrative efforts in the form of Guidance and Supervision so that in this case there is an overlapping of authority and regulations that result in uncertainty and legal benefits. In this study, normative legal research is used through research on court decisions from the first level to the final decision and from the literature. The results of this research approach, it is necessary to have clear provisions to accommodate special mining administrative crimes for companies that have mining business permits and Current Budget Activity Plans while still considering public interests, legal interests, and state interests. This is done to realize justice in mining criminal cases both in cases in research and cases that may occur in the future.

Keywords: *mining; criminal; IUP; RKAB; authority; principle of benefit.*